JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI
Journal Homepage: https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak
E-ISSN 2830-3679

Analisis Prinsip Akuntansi Syariah Pertanggungjawaban pada Strategi Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo

Eka Ria Nazmi Pani [a], ***Siti Nurholizah Mardjoen*** [b]
[a] [b] ***Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia***
Email: [a] *nazmipani12@gmail.com*, [b] *mardjoensiti@gmail.com*

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Received: 2 April 2023
Revised: 15 Mei 2023
Accepted: 19 Mei 2023

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban, Akuntasi Syariah Pertanggungjawaban, Distribusi, Pemberdayaan.

Keywords:
Accountability, Sharia Accounting Accountability, Distribution, Empowerment.

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, badan maupun organisasi pengelola zakat diharapkan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban *(accountability)* dalam rangka melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini karena dana yang dikelola oleh organisasi zakat merupakan amanah dari banyak orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip pertanggungjawaba dalam pendistribusian zakat dalam rangka pemberdayaan pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaba dengan baik dalam pendistribusian zakat maupun pengumpulan zakat. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih cukup kurang sehingga dana yang diharapkan belum memenuhi target yang dicanangkan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih untuk memberikan informasi terkait pentingnya zakat.

ABSTRACT

Zakat is one alternative that can be used to overcome poverty. Thus, zakat management bodies and organizations are expected to be able to apply the principle of accountability in the context of collecting and distributin zakat. This is because the funds managed by zakat organizations are the trust of many people. This research aims to determine the implementation of the principle of responbility in the distribution of zakat in the context of empowerment at BAZNAZ Gorontalo Province. Data was collected through interviews and observations. The results of the research show that BAZNAS Gorontalo Province has implemented the principle of responsibility well in the distribution of zakat and collection of zakat. However, the level of public awareness in paying zakat is still quite low so that the expected funds have not yet met the target set by BAZNAS Gorontalo Province. Therefore, there needs to be more outreach to provide information regarding the importance of zakat.

©2023 Eka Ria Nazmi Pani, Siti Nurholizah Mardjoen
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki posisi penting dalam rangka mendukung pemberdayaan dari sisi pengembangan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam. Dengan adanya zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada disuatu daerah. Melalui zakat, kehidupan para fakir miskin dan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat terbantu (Adnan, 2005). Dana zakat merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi zakat pada masyarakat mempunyai nilai yang cukup besar, jika dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satu organisasi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, da menyalurkan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya badan amil zakat baik pemerintah maupun non pemerintah merupakan lembaga perantara atau komisioner dalam rangka mendukung memberdayaan masyarakat melalui program yang dijalankannya (Wulansari & Setiawan, 2014).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZNAS Provinsi Gorontalo terkait prinsip akuntansi syariah pertanggungjawaban dari pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang ada di provinsi Gorontalo. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak terkait, dengan tujuan untuk membantu pengoptimalan prinsip akuntansi syariah dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini merupakan kewajiban yang diatur secara syariat (hukum islam) dan memiliki tujuan sosial, ekonomi, serta spiritual. Zakat secara harfiah berarti “pembersihan” atau “peningkatan”. Dalam konteks hukum islam, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian kecil dari harta yang dimiliki umat muslim yang mencapai nisab (batas minimal) kepada golongan yang berhak menerimanya (Muhammad, 2002). Harta yang wajib dizakatkan meliputi emas, perak, hasil pertanian, hasil pertambangan, ternak, dan kekayaan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Nisab adalah batas minimal kekayaan yang harus dimiliki agar zakat wajib dikeluarkan. Kekayaan tersebut harus mencapai atau melebihi nisab untuk wajib dizakatkan. Zakat biasanya dikeluarkan sebesar 2,5% (persen) dari harta yang telah mencapai nisab setelah berlalu satu tahun (haul).

Zakat memiliki banyak tujuan, antara lain membersihkan harta dari sifat kikir dan keserakahan, memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, menolong mereka yang membutuhkan, serta memperkuat kewajiban yang memiliki keutamaan besar

dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrument untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Prinsip Pertanggungjawaban

Jika dilihat dari makna dan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi salah satu prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban. Dalam budaya yang kita yakini, umumnya tanggung jawab memiliki makna keharusan dalam "menanggung" dan "menjawab". Dalam artian yaitu kewajiban untuk menanggung akibat yang timbul dari perilaku seseoran dalam menanggapi suatu persoalan. Prinsip pertanggungjawaban memiliki kaitan erat dengan konsep amanah. Dimana implementasinya dalam akuntansi yaitu seorang individu yang terlibat dalam suatu persoalan harus selalu bertanggungjawab penuh atas apa yang telah diamanahkan dan dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait (Yusuf, dkk., 2019)

Pertanggungjawaban *(accountability)* dalam prinsip akuntansi syariah memiliki beberapa aspek yang pentin yaitu menekankan transparansi agar informasi yang disampaikan menjadi jelas, akurat, dan dapat dipetanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat umum (Nurhayati & Susilowati, 2017). Prinsip pertanggungjawaban menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan yang menggambarkan suatu kondisi secara objektif tanpa manipulasi atau penyesatan informasi. Selain itu, pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah juga meliputi aspek akuntabilitas sosial, yan mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kulitatif sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diselidiki.

Sumber data dalam penelitian kali ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data asli dilokasi penilitian atau objek penelitian. Dimana data primer dalam penelitian ini didapatkan di BAZNAS Provinsi Gorontalo dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan hasil wawancara. Sugiyono (2016) menjelaskan wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal hal dari responden secara mendalam.

Pemilihan pendekatan ini karena metode ini lebih mudah berhubungan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif mengasumsikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati, lalu penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan yang harus diteliti (fokus penelitian).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pertanggungjawaban berangkat dari keyakinan bahwa setiap yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Pertanggungjawaban diartikan sebagai bentuk keadilan dari perbuatan setiap orang baik dalam hal kebaikan maupun kejahatan. Berdasarkan definisi pertanggungjawaban yang telah dijelaskan, pada organisasi BAZNAS menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam setiap fungsi dan bidangnya masing masing. Ada beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS yaitu program kemanusiaan, ekonomi produktif, kesehatan, pendidikan serta advokasi dan dakwah (Susilowati, 2017). Berjalannya kelima program ini tidak lepas dari adanya prinsip pertanggungjawaban. Dalam pendistribusian dana bantuan kepada penerima dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetaapkan.

Dalam konsep pertanggunjawaban perspektif akuntansi syariah telah tertuang dalam kelima program yang telah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo yang memfokuskan pada pengembangan masyarakat pada sector ekonomi, kesehatan, pendidikan serta advokasi dan dakwah dengan tujuan untuk peningkatan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui zakat.

1. Program Pendidikan berkontribusi memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang dianggap layak baik dari segi ekonomi maupun kemampuan belajarnya. Salah satu target pemberian tunjangan yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan mulai dari semester 5,6 dan 7.
2. Program Kesehatan memberikan kontribusi yakni memberikan dana bantuan untuk pengobatan bagi masyarakat fakir miskin yang tidak mampu dalam hal biaya pengobatan. Selain itu BAZNAS Provinsi Gorontalo juga memberikan bantuan berupa rumah singgah bagi masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin melakukan pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya itu, BAZNAS Provinsi Gorontalo juga memberikan bantuan pelayanan dalam pengaktifan kembali jaminan kesehatan (BPJS) bagi masyarakat yang jaminan kesehatannya bermasalah atau sudah dinonaktifkan (tidak berlaku lagi).
3. Program Ekonomi Produktif dan Program Kemanusiaan memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat kecil yang mempunyai usaha kecil. Fokus utama program ini yaitu masyarakat yang memiliki usaha kecil namun terdapat keterbatasaan dalam permodalan. Program ini dicanangkan sebagai salah satu solusi dari fenomena banyaknya pelaku usaha atau pedagang yan terjerat hutan dengan rentenir, sehingga bantuan permodalan merupakan langkah efektif yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Gorontalo meberikan modal usaha tanpa adanya bunga dan pengembalian. Dengan demikian, program-program yang dijalankan BAZNAS ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengembangan perekonomian serta kesadaran akan kepatuhan zakat khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Prinsip pertanggungjawaban diambil dari keyakinan bahwa setiap tindakan akan dimintakan pertanggunjawaban di hadapan Allah SWT. Pertanggungjawaban diartikan sebagai bentuk keadilan, baik untuk perbuatan baik maupun buruk. BAZNAS Provinsi Gorontalo menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam setiap fungsi dan programnya. Program-program yang dijalankan, seperti program kemanusiaan, ekonomi produktif, kesehatan, pendidikan, advokasi dan dakwah, diatur dengan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban.

Pendistribusian dana bantuan dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan, menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Program pendidikan memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat yang layak, dengan fokus pada mahasiswa yang sudah mencapai semester 5, 6, dan 7. Program kesehatan memberikan bantuan pengobatan bagi masyarakat fakir miskin dan juga menyediakan rumah singgah serta membantu pengaktifan kembali jaminan kesehatan (BPJS). Program ekonomi produktif memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dan pengembalian, denan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang memiliki usaha kecil. Program kemanusiaan memberikan kontribusi positif dalam memberdayakan masyarakat kecil dengan solusi efektif terhadap permasalahan seperti terjerat hutang dan renenir. Harapannya, program-program BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan akan kepatuhan zakat di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, implementasi prinsip pertanggungjawaban dalam BAZNAS Provinsi Gorontalo diwujudkan melalui program-program kemanusiaan, ekonomi produktif, kesehatan, pendidikan, advokasi, dan dakwah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. A. (2005). Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya.

Dwi Wulansari, S., & Hendra Setiawan, A. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme

Lantip, S. (2017). Tanggung jawab, Keadilan dan Kebenaran. *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 02.

Muhammad. (2002). Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat. 2002

Sri Nurhayati dan Wasilah. (2008). Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta

Thomson. (2005). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2019). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi,*

Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 13–24. https://doi.org/10.35906/je001.v7i1.318